

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2019

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, dengan definisi kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

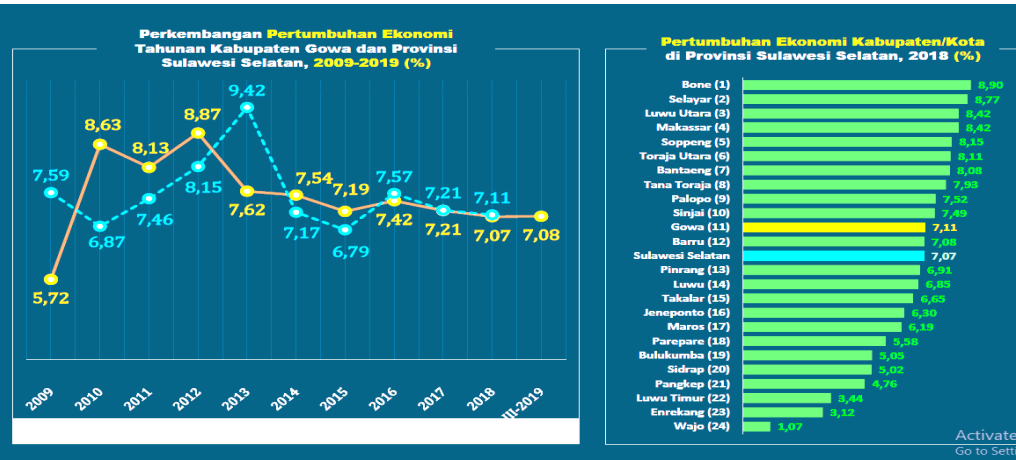
Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa *“Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*. Atas dasar tersebut, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 disusun untuk menjelaskan capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah selama tahun 2019.

### **A. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa (menggunakan tahun dasar 2009) Pada Tahun 2013 terjadi penurunan sampai Tahun 2015, kemudian dari tahun 2016 sampai tahun 2017 kembali menunjukkan tren penurunan, dan 2015 sampai tahun 2016 menunjukan adanya peningkatan pertumbuhan, namun pertumbuhannya agak lambat. Kondisi konsolidasi terjadi pada Tahun 2013 dan 2016, sedangkan pada Tahun 2016 menunjukan *performance* yang lebih baik yaitu berada pada level 7,42. Pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali menurun di level 7,21 dan pada Tahun 2018 kembali menurun di level 7,11.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2009-2018



Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2019.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2015 perekonomian Kabupaten Gowa melambat 7,19 persen hal ini diduga karena melemahnya daya beli masyarakat akibat kebijakan pemerintah terkait dengan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang berakibat naiknya harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) kemudian tahun 2016 perekonomian kabupaten Gowa kembali tumbuh 7,57 persen, kemudian dua tahun berikutnya terus melambat, masing-masing tumbuh 7,21 persen (2017) dan 7,11 persen (2018).

Menurunnya produksi tanaman pangan menjadi penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi, kabupaten Gowa sebagai daerah agraris yang mayoritas lahannya untuk pertanian tercatat beberapa komoditas utama pekebunan mengalami penurunan produksi diantaranya jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau mengalami penurunan produksi. Disamping itu kerlambatan pada tahun 2018 juga ini lebih dikarenakan faktor eksternal (ekonomi global) seperti menguatnya dolar, ketidakstabilan harga minyak mentah dunia dan naiknya harga pangan dunia.

Di samping itu adanya perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial berdampak pula terhadap perekonomian nasional dan Sulawesi Selatan sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gowa. Dibandingkan dengan 3 (tiga) Kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kabupaten Gowa, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tahun 2018 lebih tinggi dari kabupaten Takalar dan Maros akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Makassar. Sementara jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan umumnya lebih tinggi pada tahun 2018.

2. Indeks Pembangunan Manusia

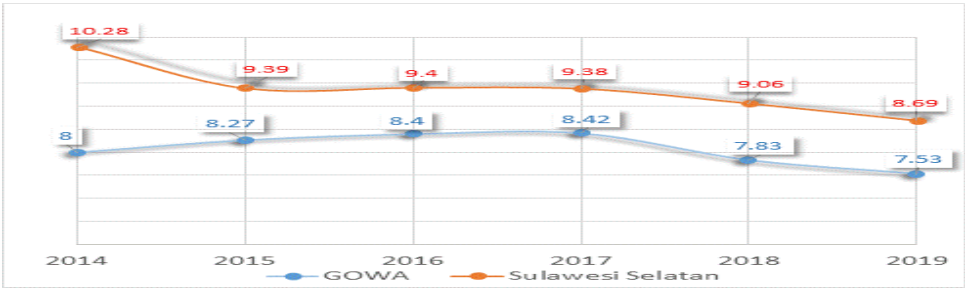
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah Kabupaten Gowa telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat (tanpa kecuali) dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa telah mencapai nilai 68,87 walaupun masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Sulawesi Selatan di angka 70,9.

### 3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai 792,64 ribu jiwa atau sebesar 9,06% dari total jumlah keseluruhan penduduk. Kabupaten Gowa sendiri pada tahun 2018 ini jumlah penduduk miskinnya berjumlah 59,34 ribu jiwa atau 7,83% terhadap total jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah ini menempatkan Kabupaten Gowa berada diposisi 8 untuk jumlah penduduk miskinnya jika dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel. Kemudian apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota tetangga Kabupaten Gowa masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Makassar yang jumlah penduduk miskinnya sebesar 66,22 ribu jiwa atau 4,41% penduduknya berada pada garis kemiskinan, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa masih lebih rendah. Berikut adalah gambaran terhadap angka kemiskinan dan perbandingan dengan 4 kabupaten/kota sekitar :

Berdasarkan data yang ada selama 10 tahun terakhir, persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa jumlah penduduk miskin Kabupaten Gowa selalu berada dibawah angka kemiskinan provinsi. Angka kemiskinan di Kabupaten Gowa pada tahun 2009 adalah 10,93 persen lebih rendah jika dibandingkan persentase penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat pada tahun 2009 adalah sebesar 11,93 persen. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan secara nasional yang pada tahun 2018 angka kemiskinan nasional adalah sebesar 9,66 persen ini juga merupakan persentase angka kemiskinan terendah selama kurun waktu 10 ini. Angka kemiskinan provinsi pada tahun 2018 adalah 9,06 persen sedangkan Kabupaten Gowa tercatat angka kemiskinannya adalah 7,83 juga merupakan angka kemiskinan terendah selama 1 dekade ini. Gambaran terhadap angka kemiskinan Kabupaten Gowa dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

**Grafik 1.2 Persentase Penduduk Miskin Gowa dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 s/d 2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Gowa, 2019.

Berdasarkan uraian gambar diatas bahwa terjadi pengurangan tingkat kemiskinan dari 8.00% (tahun 2014) menjadi 7,53% (tahun 2019) atau berkurang 0,47%. Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan karena adanya implikasi korelasi positif dari intervensi beberapa program di masing-masing SKPD yang diperuntukkan bagi penurunan angka kemiskinan, melalui intervensi program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, program pemberdayaan masyarakat dan program penguatan ekonomi makro dan kecil, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan

kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### 4. Angka Pengangguran

Indikator ketenagakerjaan yang biasa digunakan dalam evaluasi kebijakan pemerintah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan struktur penyerapan tenaga kerja baik berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja. Rujukan yang digunakan dalam penyusunan indikator ketenagakerjaan didasarkan pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus. Pendekatan teori yang digunakan berdasarkan konvensi *Standard Labor Force Concept* Nomor 138 yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization* (ILO) pada tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa, di mana batasan minimum umur penduduk yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Adapun penduduk yang berusia 15 tahun ke atas digolongkan menjadi dua, yaitu :

- Angkatan kerja, yaitu yang bekerja dan mencari kerja
- Bukan angkatan kerja, yaitu yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.

Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Gowa tahun 2018 berjumlah 546.497 jiwa, dibanding tahun sebelumnya sebesar 535.919 Jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 368.466 jiwa dari seluruh penduduk usia kerja, dibanding tahun sebelumnya sebesar 333.179 jiwa. Dari jumlah penduduk angkatan kerja tersebut di atas, pada tahun 2018 sebanyak 350.784 jiwa sudah bekerja dan sisanya adalah pengangguran terbuka sebesar 17.682 jiwa.

#### 5. Pendapatan Perkapita

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Gowa selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, PDRB Per Kapita Kabupaten Gowa mencapai Rp 16.98 Juta, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 19.03 Juta. Pada tahun 2016, PDRB Per Kapita mencapai Rp 21.03 Juta, Tahun 2017 sebesar Rp 22.98 Juta dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 25.06 Juta. Peningkatan PDRB Per Kapita tersebut disebabkan karena perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya PDRB Per Kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa semakin baik.

Kemudian bila dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2018 belum mengalami perubahan meskipun dalam rentan waktu lima tahun terakhir ada kecenderungan perlambatan atau penurunan nilai kontribusi yang disebabkan oleh pergeseran kepada sektor-sektor jasa akibat percepatan perputaran perekonomian yang dianggap lebih potensial. Sektor tersebut masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontribusi sebesar 29,11% terhadap nilai PDRB di Kabupaten Gowa.

#### 6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Ketimpangan adalah tema yang menarik perhatian dan menjadi “*current issue*” beberapa tahun terakhir. Ketimpangan jelas menjadi penanda adanya permasalahan pada kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah negara/daerah. Ketimpangan adalah hasil dari pembangunan yang berfokus pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek sosial. Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Indeks merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini atau Gini Ratio di Kabupaten Gowa dalam 4 tahun terakhir ini cenderung terus menurun dari 0.421 menjadi 0.384 artinya kesenjangan antar penduduk di Kabupaten Gowa cenderung semakin menyempit. Jika dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Selatan, Ratio Gini menempatkan

Kabupaten Gowa berada pada posisi ke-20 untuk Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada tahun 2018.

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata - rata konsumsi per kapita di Kabupaten Gowa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih masuk dalam kategori sedang (0,3 - 0,5). Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menurunkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Pergeseran angka Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Gowa yang semakin menurun memperlihatkan adanya pergeseran ke arah peningkatan pemerataan yang pada dasarnya disebabkan oleh keseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh sumber daya manusia yang tinggi sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. Namun demikian upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro environment*.

## **B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib dibedakan atas dua, yakni urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemdam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Sosial.

### **1. URUSAN PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan salah satu fokus pelaksanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah organisasi perangkat daerah/instansi yang melaksanakan urusan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.223 orang termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 20 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pendidikan dapat terwujud.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Pendidikan yang direncanakan akan dicapai Dinas Pendidikan pada T.A. 2019 sebesar Rp.157.061.940.764,90 dan terealisasi sebesar Rp.144.924.965.343,27 atau 92,27% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.453.663.860.430,95 dan terealisasi sebesar Rp.437.710.709.121,00 atau 96,48% dari alokasi anggaran.

### **2. URUSAN KESEHATAN**

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingginya Angka Harapan Hidup Masyarakat. Kabupaten Gowa yang sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan program Kesehatan Gratis berupaya untuk terus mensejahterakan masyarakat Gowa.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah instansi yang diserahi tugas menangani

urusan kesehatan telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.321 orang termasuk tenaga kesehatan di 28 puskesmas dengan 38 jabatan struktural yang diisi oleh 38 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan kesehatan dapat terwujud.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Kesehatan yang direncanakan akan dicapai Dinas Kesehatan dan Kantor Pelayanan RSU Syekh Yusuf pada T.A. 2019 sebesar Rp.224.377.065.967,00 dan terealisasi sebesar Rp.210.276.059.826,31 atau 93,72% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan RSUD Syekh Yusuf, dialokasikan anggaran Program Belanja Tidak Langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.915.168.548,20 dan terealisasi sebesar Rp.90.515.964.062,00 atau 101,80% dari alokasi anggaran.

### **3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 148 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terwujud.

Alokasi anggaran Belanja Langsung program/kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang direncanakan akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.323.645.170.229,19 dan terealisasi sebesar Rp.311.460.932.686,93 atau 96,24% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.886.667.615,80 dan terealisasi sebesar Rp.9.602.518.160,00 atau 97,13% dari alokasi anggaran.

### **4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman.

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.2.107.389.988,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.034.488.554,00 atau 96,54% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang direncanakan akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja

- pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.776.588.274,41,- dan terealisasi sebesar Rp.2.622.809.953,00 atau 94,46% dari alokasi anggaran.
- 5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sebelumnya merupakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran adalah organisasi pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 78 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang direncanakan akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.9.487.217.091,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.154.307.243,00 atau 96,49% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang direncanakan akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.091.871.592,87 dan terealisasi sebesar Rp.5.795.479.292,00 atau 95,13% dari alokasi anggaran.

**6. URUSAN SOSIAL**

Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas urusan sosial telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan, termasuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat miskin dan penanganan terhadap gelandangan, pengemis, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 46 orang dengan 33 jabatan struktural yang diisi oleh 33 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

Alokasi anggaran program/kegiatan urusan sosial yang direncanakan akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa pada T.A. 2019 sebesar Rp.7.296.787.373,10 dan terealisasi sebesar Rp.7.050.194.714,00 atau 96,62% dari alokasi anggaran.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, dialokasikan anggaran program belanja tidak langsung melalui kegiatan belanja pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.415.922.075,95 dan terealisasi sebesar Rp.4.319.267.223,00 atau 97,81% dari alokasi anggaran.

Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berbasis pada Hak - Hak Dasar Kesetaraan Gender, Nilai Budaya dan Agama					
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7.78	7.75*	99.61
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13.53	13.29*	98.22

2	Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.01	70.11*	100
3	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Terjangkau dan Aman	Ketersediaan Pangan Utama(Ton)	163.886	251.563	153.49
4	Meningkatnya Layanan Perumahan yang Layak	Rasio Rumah Layak Huni (%)	72.32	72.33	100
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Lapangan Berusaha	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3.37	4.80	57.56
6	Meningkatnya Rasa Aman dan Tentram	Angka Kriminal (Kasus)	842	1.260	50.35
		Tingkat Waktu Tangga Daerah Layanan Wilayah Manajemen Bencana (Menit)	<60	<60	100
7	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	90.59	90.62	100.33
		Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Kasus)	190	27	185
8	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.03	1.66	118.23
		Angka Kelahiran Total/ TFR (%)	2.47	2.00	119
9	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan	Tingkat Kemiskinan (%)	7.25	7.83*	92
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5.06	5.06	100
10	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Organisasi Kepemudaan yang Aktif (%)	49.64	59	118.85
		Cabang Olahraga yang Berprestasi (%)	32.33	13	40.21
11	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya	Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan	61.54	69.05	112
12	Meningkatnya Kualitas Kehidupan yang Religius	Rasio Tempat Ibadah Terhadap Penduduk(%)	1: 362	1:361	99.77
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis pada Potensi Unggulan dan Ekonomi Kerakyatan					
13	Meningkatnya Produksi Pertanian,Peternakan dan Perikanan	Produksi Padi (Ton)	401.599	408.329	101
		Produksi Jagung (Ton)	225.595	288.200	127
		Produksi Kakao (Ton)	1.700	1.541	90.64
		Produksi Kopi (Ton)	2.500	2.577	103.08
		Populasi Sapi Potong (Ekor)	114.424	114.723	100.26
		Produksi Ikan (Ton)	805	840.3	104.38
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Lingkungan (Baku Mutu)	≤ Baku Mutu	≤ Baku Mutu	100
		Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	100
		Presentase Penanganan Sampah (%)	57.48	60.45	105.17
15	Meningkatnya Pengembangan Koperasi,UMKM dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Koperasi (%)	4.38	4.84	110
		Pertumbuhan UMKM (%)	2.77	2.28	82.31
		Paritas Daya Beli (Rp)	882.44	936.90	106
16	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	Kunjungan Wisata (Orang)	120.473	264.045	219
17	Meningkatnya Iklim Investasi dan Perdagangan	Nilai Investasi (Juta Rp)	692.305.03	3.303.304.782.337	477.15
		Laju Inflasi (%)	4.00	2.38	140.5
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Antar Wilayah dan Sektor					
18	Meningkatnya kapasitas Infrastuktur Perhubungan dan Pengairan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	70.64	92.69	131
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	189	256	65



		Persentase Luas Areal Irigasi (%)	86.5	89.37	103
19	Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai Peruntukannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah (%)	27.1	43.02	158.74
		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	77.76	72.44	93
20	Meningkatnya Kualitas Kawasan Pemukiman	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih (%)	71.85	77.59	107.98
		Kawasan Kumuh (ha)	214	214	100
		Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	70.20	70.20	100
Misi 4 : Meningkatkan Pengembangan Wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan					
21	Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan berstatus Cepat Berkembang (%)	17.96	35.93	200
22	Meningkatnya Kerjasama dan Keintegrasian Pengembangan Wilayah Berbasis Kawasan	Persentase Kawasan yang Dikelola (%)	30.77	28.90	94
Misi 5 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Demokratis					
23	Meningkatnya Kapasitas pemerintahan	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPД (%)	100	100	100
		Penjabaran Program RKPД ke dalam APBD (%)	100	100	100
		Proporsi PNS dengan Standar Kompetensi Pegawai (SKP) pada Kategori Baik (%)	96	99.80	103
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai satuan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	B	100
		Kategori laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi		
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP		
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan Publik yang Memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berkategori Baik (%)	60	83.86	139.77
		Persentase SKPD yang Menerapkan Sistem Informasi (%)	70.59	100	141.66
26	Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi	Pertumbuhan Kerugian Negara/Daerah (%)	8.13	253.85	29.22
27	Meningkatnya Partisipasi dalam Kehidupan Sosial Politik.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu.	Peleg 78 Pilpres 77	76.41	97.96

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Gowa, Tahun 2019 (data diolah).

### **C. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2019 yang lalu oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menempatkan Pemerintah Kabupaten Gowa pada nilai 3.4920.

Sedangkan terkait Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga membawa Pemerintah Kabupaten Gowa telah 8 (Delapan) Kali berturut - turut mendapatkan opini tertinggi tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **D. RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA ANGGARAN DAERAH**

Untuk Tahun Anggaran 2019 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.872.059.870.736,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.870.608.908.440,64 atau sebesar 99,92 persen yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Rp.226.383.659.880,00 telah terealisasi sebesar Rp.238.239.570.974,67 atau 105,24 persen, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.96.114.635.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.112.451.239.497,56 atau 117,00 persen;
  - Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.84.296.107.811,00 dengan realisasi sebesar Rp.79.360.833.550,00 atau 94,15 persen;
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.5.170.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.966.988.917,00 atau 96,07 persen;
  - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.40.802.916.639,00 dengan realisasi sebesar Rp.41.460.509.010,11 atau 101,61 persen.
- b. Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp.1.545.252.100.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.528.860.873.865,97 atau 98,94 persen, dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, dari target Rp.1.275.221.543.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.258.904.850.116,00 atau 98,72 persen dengan rincian:
    - Bagi Hasil Pajak, dari target Rp.15.455.961.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.977.570.920,00 atau 71,02 persen;
    - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dari target Rp.7.336.232.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.693.094.277,00 atau 63,97 persen;
    - Dana Alokasi Umum, dari target Rp.887.926.896.000,00 yang terealisasi 100 persen;
    - Dana Alokasi Khusus, dari target Rp.364.502.454.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.355.307.288.919,00 atau 97,48 persen;
  - 2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dengan target sebesar Rp.168.072.826.000,00 dengan realisasi sebesar 100 persen.
  - 3) Transfer Pemerintah provinsi dengan target sebesar Rp.101.957.731.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.101.883.197.749,97 atau 99,93 persen.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp.100.424.110.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.103.508.463.600,00 atau 103,07 persen.

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.949.937.983.815,39 dan terealisasi sebesar Rp.1.865.956.399.756,48 atau 95,69 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

**a. Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.492.701.734.068,97 yang terealisasi sebesar Rp.1.435.864.711.398,51 atau 96,19 persen dari yang dianggarkan.

**b. Belanja Modal**

Untuk tahun anggaran 2019 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.455.060.806.046,42 dengan realisasi sebesar Rp.428.521.081.588,97 atau 94,17 persen dari yang dianggarkan.

**c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi 100,00 persen dari yang dianggarkan.

**d. Transfer**

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.1.675.443.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.070.606.769,00 atau 63,90 persen dari yang dianggarkan.

Adapun pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Penerimaan Daerah atas pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.141.351.245.044,91 yang mana dapat terealisasi sebesar Rp.141.351.245.045,91 atau 100,00 persen dari target yang direncanakan, sedangkan Pengeluaran Daerah atas pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.57.544.833.965,52 terealisasi sebesar Rp.53.480.000.000,00 atau 92,94 persen.

**E. PENUTUP**

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perkembangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, pemerintah daerah diwajibkan membuat dan menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada masyarakat dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2019 mencapai kinerja cukup memuaskan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, regulasi maupun anggaran.

Atas capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa yang telah memberikan dukungan dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gowa.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Dengan harapan laporan ini dapat menjadi referensi dan sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun yang akan datang.

**BUPATI GOWA,**

**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH.**